EDISI 17 OKTOBER 2026

Media Komunikasi dan Informasi Anggota GAPKI

# GAPKI NEWS



## MENGANTISIPASI RISIKO

# PENURUNAN PRODUKSI

# Mencari Solusi Peningkatan Produksi

**Pembaca yang budiman,**

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kekuatan sehingga buletin *GAPKI News* edisi Oktober 2026 dapat diterbitkan sesuai rencana. Materi yang disajikan diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Industri sawit kembali dihadapkan pada tantangan besar begitu memasuki semester kedua tahun 2026. Musim kemarau panjang dan fenomena El Niño yang benar-benar terjadi akan berdampak terhadap produksi sawit tahun depan. Padahal, kebutuhan sawit tahun depan semakin besar seiring penerapan B50 secara penuh. Sayangnya, produktivitas sawit belum banyak berubah sehingga menjadi tantangan tersendiri.

Kondisi ini membutuhkan langkah antisipatif sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan kebijakan tersebut, diharapkan keseimbangan antara produksi, kebutuhan pangan dan ekspor dapat terpenuhi tanpa mengorbankan salah satu di antaranya. Ini jalan tengah yang perlu menjadi refleksi kita bersama. Di samping itu, upaya peningkatan produksi terutama melalui PSR harus benar-benar dapat direalisasikan untuk menjamin peningkatan produksi ke depan.

Selain itu, *GAPKI News* edisi Oktober 2026 juga mempublikasikan peristiwa penting antara lain partisipasi GAPKI di kegiatan internasional, konsolidasi organisasi di pusat serta cabang, hingga aktivitas yang berkaitan dengan pemerintah. Semua aktivitas ini diharapkan dapat menambah *spirit* kita sebagai pelaku industri kelapa sawit.

Semoga edisi ini semakin memperkuat peran dan posisi GAPKI di pasar sawit domestik dan global. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat membaca. ■

**Salam,**
**Redaksi GAPKI News**


## GAPKI News

Media Komunikasi dan Informasi Anggota GAPKI

**PENERBIT**
GAPKI Pusat

**PEMBINA**
Eddy Martono
Sany Anthony
Susanto Yang
Satrija B. Wibawa
M. Hadi Sugeng
Mona Surya

**PENGARAH**
Mukti Sardjono

**TIM AHLI**
Para Ketua Bidang
Pengurus Pusat GAPKI

**PENANGGUNG JAWAB**
Bandung Sahari

**Dewan Redaksi**
Yudha Negara Nyoman
Indah Permata Soegyarto
Mochamad Husni
Dyah Laras Wulandari
Susan Sri Rahayu
Eko Tamba

**ALAMAT**
Kantor GAPKI Pusat
Sudirman Park Blok B-18
Jalan KH Mas Mansur Kav. 35
Jakarta 10220

(+62) 21-5794-3871
gapki@gapki.id | gapkipusat@yahoo.com




Mengantisipasi Risiko Penurunan Produksi.....8,9

Salam Redaksi..... 2
Daftar Isi..... 3
Produksi Minyak Sawit Naik Sepanjang Juli 2026..... 4
Inovasi dan Transformasi Sebagai Kunci Keberlanjutan Sawit..... 5
Optimalkan IE-CEPA untuk Perdagangan Sawit Berkelanjutan..... 6
GAPKI dan Forwatan Kembangkan Komunikasi Berkelanjutan..... 7
Mengenali Potensi Risiko PKS Tanpa Kebun.....10
Memperkuat Perlindungan Pekerja Perempuan..... 11
Seharusnya Produksi Kita 60 Juta Ton..... 12,13




Mencegah Kekerasan Melalui Penguatan Komite Gender.....14



Kenalkan Sawit Pada Anak Sejak Dini.....15

GAPKI Akselerasi Pencapaian Sertifikasi ISPO 100 Persen.....16
Memperkuat Kemitraan Melalui Penyamaan Persepsi FPKMS.....17
GAPKI Sumut Dukung Grand Design Riset Sawit BRIN.....18
Produktivitas Sebagai Kunci Menjaga Ekspor.....19
GAPKI Perluas Kolaborasi dengan India..... 20
Digitalisasi Mempermudah Ketertelusuran Sawit..... 21
GAPKI Berikan Masukan Tata Kelola BMKS..... 22
Publik Butuh Publikasi Sawit yang Seimbang dan Akurat.....23
Sinergi Sebagai Kunci Ketahanan Pangan dan Energi.....24

# PRODUKSI MINYAK SAWIT **NAIK SEPANJANG JULI 2026**



***Peningkatan konsumsi terjadi pada sektor biodiesel dari 1,131 juta ton menjadi 1,285 juta ton.***

Produksi CPO pada Juli 2026 mencapai 4,904 juta ton atau naik 1,68% dibandingkan Juni 2026 sebesar 4,823 juta ton. Begitu juga produksi PKO pada Juli 2026 yang naik menjadi 466 ribu ton dari bulan sebelumnya sebanyak 449 ribu. Total produksi CPO dan PKO pada Juli 2026 mencapai 5,370 juta ton. Total produksi ini lebih tinggi 1,87% dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebanyak 5,272 juta ton.

Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono melalui pernyataan tertulis pada 28 September 2026 mengatakan secara kumulatif produksi CPO dan PKO periode Januari–Juli 2026 mencapai 35,654 juta ton atau lebih tinggi 6,45% dibandingkan periode yang sama tahun 2025 sebesar 33,495 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi dalam negeri pada Juli 2026 naik 3,35% dari 2,201 juta ton pada Juni 2026 menjadi 2,275 juta ton. Peningkatan konsumsi terjadi pada sektor biodiesel dari 1,131 juta ton menjadi 1,285 juta ton. Penurunan terjadi pada konsumsi pangan dari 878 ribu ton pada Juni 2026 menjadi 805 ribu ton pada Juli 2026.

Penurunan terjadi pada konsumsi oleokimia dari 192 ribu ton pada Juni 2026 menjadi 185 ribu ton pada Juli 2026. Secara kumulatif konsumsi dalam negeri periode Januari-Juli 2026 sebanyak 15,219 juta ton atau naik 6,38% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sepanjang Juli 2026, ekspor produk sawit turun 2,67% dari 3,275 juta ton pada Juni 2026 menjadi 3,188 juta ton. Penurunan sebesar 25,70% terjadi pada ekspor CPO dari 335 ribu ton pada Juni 2026 menjadi 249 ribu ton. Sedangkan ekspor olahan minyak sawit juga turun 2,57% dari 2,357 juta ton menjadi 2,296 juta ton. Adapun ekspor olahan minyak inti sawit juga turun menjadi 99 ribu ton dari bulan sebelumnya sebanyak 116 ribu ton.

Menurut Mukti Sardjono, kenaikan ekspor terjadi pada oleokimia sebesar 14,94% dari 467 ribu ton pada Juni 2026 menjadi 537 ribu ton pada Juli 2026. Secara kumulatif total ekspor periode Januari–Juli 2026 meningkat 2,91% menjadi 19,782 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 19,223 juta ton.

Untuk nilai ekspor produk sawit pada Juli 2026 mencapai US$ 3,81 miliar atau turun 2,89% dibandingkan Juni 2026 sebesar US$ 3,92 miliar. Rata-rata harga ekspor CPO pada Juli 2026 sebesar US$ 1.168 per ton.

Harga rata-rata ini lebih rendah dibandingkan harga rata-rata Juni 2026 sebesar US$ 1.174 per ton. Secara kumulatif nilai ekspor periode Januari–Juli 2026 sebesar US$ 23,26 miliar atau lebih tinggi 10,92% dari tahun 2025.

Mukti Sardjono mengatakan rata-rata harga ekspor CPO selama periode Januari–Juli 2026 mencapai US$ 1.137 per ton. Harga rata-rata ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata periode yang sama tahun 2025 sebesar US$ 1.075 per ton.

Untuk negara tujuan ekspor, peningkatan ekspor pada Juli 2026 dibandingkan Juni 2026 terjadi untuk tujuan Uni Eropa 104 ribu ton (40%), Afrika 61 ribu ton (17%), Amerika Serikat 44 ribu ton (20%), dan China 25 ribu ton (4%). Sedangkan penurunan ekspor terjadi untuk tujuan India 81 ribu ton (-20%), Rusia 69 ribu ton (-69%), Malaysia 69 ribu ton (32%), Pakistan 47 ribu ton (-17%) dan Bangladesh 35 ribu ton (-21%).

Namun, apabila dihitung secara kumulatif selama periode Januari–Juli 2026, ekspor ke China 30% lebih tinggi dari tahun 2025, ke Malaysia 14% lebih tinggi, Afrika 5% lebih tinggi, Uni Eropa 4% lebih tinggi dan Rusia 2% lebih tinggi. Sebaliknya ekspor ke India 20% lebih rendah dari tahun 2025, Pakistan 13% lebih rendah, Amerika 4% lebih rendah dan Bangladesh 3% lebih rendah.

Dengan kinerja sawit ini, dengan stok awal tahun sebesar 2,068 juta ton, total produksi Januari–Juli 2026 sebesar 35,435 juta ton, total konsumsi dalam negeri 15,219 juta ton, total ekspor 19,782 juta ton, dan impor 38 ribu ton, maka stok akhir pada Juli 2026 sebesar 2,758 juta ton. ■



# INOVASI DAN TRANSFORMASI **SEBAGAI KUNCI KEBERLANJUTAN SAWIT**

***"Penguatan sektor hulu bukan hanya untuk peningkatan produktivitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan."***




Industri sawit Indonesia memasuki fase penting di tengah meningkatnya kebutuhan minyak nabati dunia, ekspansi energi berbasis biodiesel, dan tuntutan pasar global terhadap produk berkelanjutan. Sebagai komoditas yang terbukti tahan guncangan, industri ini tetap dituntut berinovasi untuk mendorong keberlanjutannya. "Ketahanan saja tidak lagi cukup. Industri ini harus melangkah lebih jauh melalui inovasi dari hulu hingga hilir," kata Ketua Umum GAPKI Eddy Martono ketika membuka *9th Borneo Forum 2026* di Balikpapan pada 6 Agustus 2026.

Forum tahunan GAPKI cabang se-Kalimantan ini mengangkat tema *Resilience, Innovation, and Transformation: Empowering the Palm Oil Industry Beyond Sustainability*. Forum ini dihadiri oleh pengurus GAPKI Pusat dan Cabang, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji, Kepala Dinas Perkebunan, perwakilan Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan, BPDP, pelaku industri, dan akademisi. Tema *Borneo Forum 2026* merupakan cermin dari perjalanan dan dinamika industri sawit hingga menjadi komoditas andalan Indonesia.

Menurut Eddy Martono, inovasi berbasis teknologi digital, kecerdasan buatan, mekanisasi, dan lainnya adalah proses transformasi yang sedang berjalan di industri sawit. Pengayaan sumber daya genetik dan introduksi serangga penyerbuk dari Tanzania adalah inovasi yang telah dilakukan. Terobosan di sektor hulu ini dilakukan bersama BPDP, Kementan, Badan Karantina, PPKS, dan konsorsium perusahaan sawit. Tahun ini, sumber daya genetik baru dari Zambia akan didatangkan sebagai bagian dari transformasi industri sawit.

Selain di sektor hulu, transformasi juga harus memperkuat tata kelola industri sawit secara komprehensif. Perbaikan ini diharapkan mampu mempercepat peremajaan sawit rakyat, memperluas hilirisasi, pengembangan ekonomi sirkular, hingga mengubah cara pandang terhadap keberlanjutan. Isu keberlanjutan bukan sekadar pemenuhan standar pasar tetapi, fondasi untuk daya saing jangka panjang. "Oleh karena itu, GAPKI berkomitmen agar seluruh anggotanya memperoleh sertifikat ISPO," katanya.

Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana BPDP, Lupi Hartono menegaskan BPDP terus mendorong penguatan sektor hulu sawit untuk mendukung peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan rakyat. "Penguatan sektor hulu bukan hanya untuk peningkatan produktivitas, tetapi juga memastikan keberlanjutan," katanya. Oleh karena itu, penguatan sektor hulu membutuhkan kolaborasi lintas pihak.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mendorong pelaku industri sawit di wilayahnya meningkatkan hilirisasi karena potensinya sangat besar. Provinsi ini memiliki 1,6 juta hektar kebun sawit dengan produksi 4,3 juta ton/tahun. "Kami mendorong transformasi ekonomi agar tidak terlalu bergantung pada sektor pertambangan," katanya. Hilirisasi dan penguatan ekonomi masyarakat menjadi arah pembangunan daerah, terutama melalui sektor perkebunan sawit.

Potensi investasi untuk hilirisasi di Kalimantan Timur masih terbuka lebar. Dengan produksi 4,3 juta ton CPO, provinsi ini baru memiliki dua pabrik minyak goreng. "Kami ingin lebih banyak industri pengolahan turunan sawit agar nilai tambahnya dapat dinikmati di daerah," katanya. Dengan hilirisasi yang kuat, rantai ekonomi sawit diharapkan tidak berhenti pada produksi bahan baku. Industri sawit diharapkan berkembang menjadi sektor yang memiliki nilai tambah dengan menciptakan lapangan kerja dan memperbesar kontribusi ekonomi.

Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Timur Rahmat Perdana Angga mengatakan Borneo Forum 2026 merupakan ruang strategis yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, investor, akademisi, dan masyarakat dalam membahas masa depan industri sawit Indonesia. Industri ini penopang penting perekonomian Kalimantan Timur melalui penyerapan tenaga kerja dan kontribusi pada pendapatan daerah. Forum ini diharapkan melahirkan gagasan dan langkah strategis untuk memperkuat daya saing sawit dan menjadikan sawit semakin berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. ■




# OPTIMALKAN IE-CEPA UNTUK PERDAGANGAN PRODUK SAWIT

***IE-CEPA membuka akses pasar melalui penurunan tarif, mendukung kesiapan Indonesia menghadapi EUDR.***

Indonesia perlu mengoptimalkan IE-CEPA (*Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement*) untuk meningkatkan perdagangan dengan negara-negara Eropa yang tergabung dalam EFTA (*European Free Trade Association*). Perjanjian kerja sama yang ditandatangani pada 2025 dengan Swiss, Liechtenstein, Islandia, dan Norwegia ini dapat menjembatani celah pada persyaratan EUDR yang akan diberlakukan tahun depan.

Peluang ini disampaikan oleh Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan dalam *OFI International 2026* di Amsterdam, Belanda pada 21–23 September 2026. Dia mempresentasikan materi berjudul *EUDR and IE-CEPA: Challenges and Opportunities for Indonesia's Palm Oil Industry*. Pembahasannya berfokus pada tantangan dan peluang sawit Indonesia di tengah berlakunya EUDR dan IE-CEPA serta pembaruan kebijakan nasional serta prospek industri sawit pada 2027.

IE-CEPA membuka akses pasar melalui penurunan tarif, mendukung kesiapan Indonesia menghadapi EUDR, dan memperkuat transparansi dan ketertelusuran. IE-CEPA juga dapat memperdalam kerja sama teknis dan kelembagaan, dan menjaga dialog mengenai standar keberlanjutan kedua pihak. "Keberhasilan IE-CEPA bergantung pada tiga syarat," katanya. Pertama, penguatan ketertelusuran dan verifikasi ISPO. Kedua, dukungan teknis, digital, dan finansial bagi petani. Ketiga, dialog kebijakan Indonesia dan Uni Eropa yang konsisten.

Untuk memenuhi tiga syarat ini, GAPKI mengusulkan integrasi data lahan dan legalitas ke dalam arsitektur data nasional bersama. Definisi deforestasi dan tanggal batas ketentuan ini harus diselaraskan. Selain itu, diperlukan perangkat penilaian risiko ISPO–EUDR beserta *helpdesk* teknis nasional, serta memperluas pemetaan dan sertifikasi berbasis kelompok bagi petani. "Secara prinsip, sektor sawit Indonesia relatif siap menghadapi EUDR tetapi masih ada pekerjaan," katanya.

Menurut Fadhil Hasan, kepatuhan hukum industri sawit Indonesia sudah menjadi inti ISPO sejak awal. Begitu juga sebagian data geolokasi tersedia melalui Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B). Namun, petani sawit swadaya menjadi pihak yang paling terdampak EUDR. Produksi minyak sawit petani mencapai 35–40% minyak sawit dunia, tetapi hanya mewakili 8% pasokan bersertifikat. EUDR menuntut CPO bebas deforestasi, diproduksi secara legal, dan dapat ditelusuri hingga titik asalnya melalui data geolokasi yang presisi.

Meskipun menghadapi tantangan, posisi minyak sawit tetap strategis dalam perdagangan minyak nabati dunia. Minyak sawit menyumbang 34,2% produksi minyak nabati global pada 2025/2026, di atas kedelai (30,3%), *rapeseed* (15,2%), dan bunga matahari (8,9%). Selain itu, sawit paling efisien dibandingkan tanaman lainnya. Satu hektare kebun sawit menghasilkan minyak 5-10 kali lebih banyak dibandingkan kedelai atau bunga matahari.

Peran signifikan minyak sawit juga dipaparkan Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam pertemuan dengan MVO Netherlands, asosiasi industri minyak dan lemak Belanda, di Indonesia House Amsterdam pada 24 September 2026. Pertemuan ini difasilitasi oleh KBRI di Den Haag dan dihadiri oleh Dubes RI untuk Belanda, L. Amrih Jinangkung. Pertemuan ini membahas perkembangan kebijakan sawit Indonesia dan kaitannya dengan kebijakan Uni Eropa, khususnya EUDR dan IE-CEPA.

GAPKI mendorong IE-CEPA dioptimalkan dalam perdagangan minyak sawit karena memberi beberapa peluang positif. IE-CEPA mengatur kuota bebas bea masuk untuk minyak sawit mentah dan minyak inti sawit. Selain itu, perluasan akses pasar sawit Indonesia di Uni Eropa terbuka setelah perjanjian berlaku. Hal ini harus diimbangi ketertelusuran yang kredibel, aspek keberlanjutan, dan pengakuan atas sistem sertifikasi Indonesia tanpa mengorbankan daya saing sawit Indonesia di pasar Eropa.

Eddy Martono mengatakan berbagai perkembangan kebijakan sawit sebaiknya tidak dilihat secara terpisah, tetapi bagian dari penguatan kerja sama Indonesia–Uni Eropa. Melalui komunikasi terbuka dan semangat kemitraan, kedua pihak diyakini dapat menemukan jalan yang menghormati kepentingan seluruh pemangku kepentingan mulai dari petani kecil di Indonesia hingga konsumen dan pelaku usaha di Eropa.■

# GAPKI DAN FORWATAN KEMBANGKAN **KOMUNIKASI BERKELANJUTAN**

***Komunikasi berkelanjutan membantu publik memahami sawit secara komprehensif.***




Komunikasi yang intensif antara industri sawit dan media merupakan salah satu kunci dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran sawit dalam perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pemahaman publik, semakin besar peluang mereka untuk bijak dalam memilah informasi tentang sawit. Komunikasi berkelanjutan dibutuhkan untuk mendorong pemberitaan yang akurat, berbasis data, dan lengkap.

"Oleh karena itu, komunikasi yang dibangun tidak cukup hanya berlangsung ketika muncul isu tertentu, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan," kata Ketua Bidang Komunikasi GAPKI, Bandung Sahari dalam *Media Gathering GAPKI dan Forwatan (Forum Wartawan Pertanian)* di Jakarta pada 14 Agustus 2026. Komunikasi berkelanjutan dilakukan dengan terus menjalin hubungan yang lebih erat dengan media sehingga setiap perubahan dan perkembangan industri sawit dipahami media secara utuh.

Komunikasi yang berkelanjutan dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan informasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dari dalam dan luar negeri. Banyak aspek dalam industri sawit yang perlu diketahui oleh media sebagai materi publikasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, data dan informasi yang lengkap dari industri dapat menjadi materi untuk kebutuhan komunikasi dengan publik. Bahkan, komunikasi yang dibangun menghasilkan informasi yang lebih substantif dan berdampak positif bagi masyarakat dan bangsa.

Bandung Sahari mengatakan industri sawit memiliki keterkaitan yang luas dengan berbagai aspek ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, berbagai tantangan yang terjadi perlu dipandang secara menyeluruh dan tidak hanya dari satu perspektif. Industri sawit bukan sekadar kebun kelapa sawit atau minyak mentah sawit. Industri sawit ini mencakup dimensi yang lebih luas antara lain regulasi, sumber daya manusia, keamanan, pendidikan, hingga lingkungan. Hal ini yang perlu dipahami secara utuh melalui publikasi media.

Menurut Bandung Sahari, *gathering* bersama media dalam suasana informal bukan sekadar silaturahmi biasa. Kegiatan ini juga untuk membangun pemahaman bahwa tantangan yang dihadapi oleh industri sawit adalah tantangan bersama. Kepentingan yang diperjuangkan oleh industri sawit adalah kepentingan masyarakat Indonesia. Dengan perspektif yang sama, maka setiap tantangan yang dihadapi oleh industri sawit akan direspons secara kolaboratif. "Kita ini sudah seperti keluarga," katanya.

Ketua Umum Forwatan, Beledug Bantolo, mengatakan bahwa penguatan komunikasi antara industri sawit dan media akan meningkatkan penyampaian informasi tentang sektor sawit kepada masyarakat. "Penguatan hubungan ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem komunikasi sawit yang lebih terbuka," katanya. Dia sepakat dengan pendapat Ketua Bidang Komunikasi GAPKI bahwa komunikasi tidak hanya dibangun ketika terdapat persoalan atau isu tertentu.

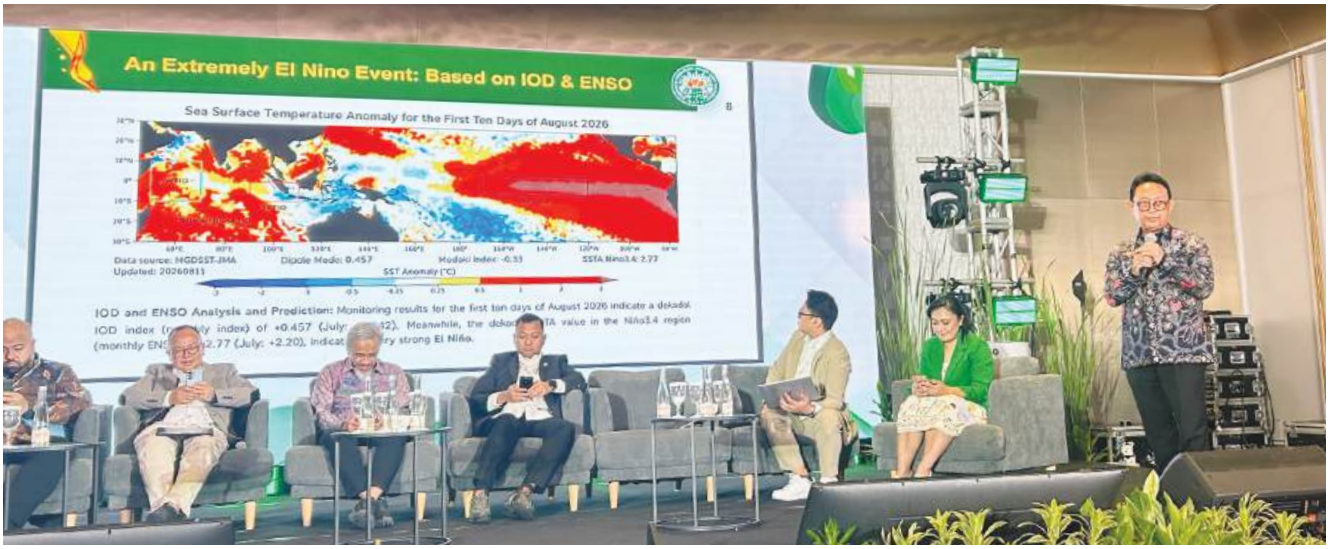
Menurut Bantolo, komunikasi berkelanjutan sangat membantu memperkuat pemahaman bersama mengenai perkembangan industri sawit. Selain itu, kondisi ini dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih terbuka dan kredibel. Sebab, informasi tentang komoditas sawit akan terus diperbarui sehingga publik mendapatkan informasi yang komprehensif, substantif, berimbang, dan tepat sasaran.

Sasaran akhir dari komunikasi berkelanjutan ini adalah pemahaman masyarakat tentang komoditas sawit lebih utuh. Dengan demikian, publik bukan sekadar memahami, tetapi juga menyadari betapa besar kontribusi sawit pada kehidupan masyarakat Indonesia. ■



# MENGANTISIPASI RISIKO **PENURUNAN PRODUKSI**

***Penurunan produksi merupakan alarm untuk mengingatkan para pemangku kepentingan industri sawit.***




Berbagai peristiwa yang terjadi pada semester kedua 2026 patut mendapat perhatian serius industri sawit nasional. Upaya untuk meningkatkan produksi sawit menghadapi tantangan besar yang berpotensi menurunkan produksi. Fenomena *Strong* El Niño dan kondisi positif *Indian Ocean Dipole* (IOD) menyebabkan kekeringan tanpa hujan hingga akhir tahun yang berpotensi menekan produksi CPO secara signifikan tahun depan. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan juga menambah tekanan bagi upaya peningkatan produksi minyak sawit.

Namun, tantangan terbesar bukan berasal dari fenomena alam. Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sejak 2017 yang berjalan lambat perlu menjadi fokus bersama. “Masalah utama yang membebani produksi kita sebenarnya adalah terkendalanya peremajaan sawit rakyat,” kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam *ASPEBINDO Bioenergy Business Summit 2026* dengan tema *Accelerating Indonesia’s Bioenergy Ecosystem Toward Energy, Security, and Green Economic Growth* di Jakarta pada 26-27 Agustus 2026.

## PSR sebagai kunci peningkatan produksi harus mendapatkan prioritas.

Forum ini menghadirkan pemateri seperti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Bursah Zarnubi, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono dan pembicara lainnya. GAPKI berfokus membahas kesiapan industri sawit mendukung mandatori B50 dan produktivitas sawit stagnan dan cenderung turun dalam beberapa tahun terakhir ini.

Potensi penurunan produksi merupakan *alarm* untuk mengingatkan pemangku kepentingan industri sawit. Di tengah konsumsi dalam dan luar negeri yang meningkat, terutama untuk biodiesel B50 dan ekspor, kondisi ini harus segera dicari jalan keluarnya. Sebab, penurunan produksi akan berdampak pada berbagai aspek seperti keberhasilan B50, daya saing sawit Indonesia, hingga Pungutan Ekspor (PE) sebagai sumber pendanaan untuk PSR. Oleh karena itu, PSR sebagai kunci peningkatan produksi harus mendapatkan prioritas.

Program PSR berpengaruh langsung terhadap produksi sawit nasional. Produksi tahun lalu seharusnya bisa di atas 60 juta ton apabila PSR berjalan sesuai target. Tetapi, realisasi PSR tidak sesuai target sehingga produksi sawit 51,6 juta ton. Masalah utama PSR adalah perizinan karena dana peremajaan sawit sudah disediakan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). GAPKI mendorong proses perizinan disesuaikan kembali agar tidak memberatkan sehingga petani mampu memenuhi persyaratan dan bersedia meremajakan tanaman sawitnya.

Menurut Eddy Martono, PSR adalah harga mati untuk meningkatkan produksi sawit saat ini dan di masa depan. Dengan luas 6,71 juta hektar atau 41% dari total kebun sawit, produksi sawit rakyat berpengaruh besar terhadap produksi nasional. Produktivitas rata-rata sawit rakyat berusia tua sekitar 10 hingga 12



ton per hektar/tahun. Sedangkan sawit hasil peremajaan berpotensi memproduksi sawit hingga 20-24 ton per hektar/tahun. Data dari Kementerian Pertanian ini menggambarkan peran signifikan sawit rakyat dan PSR.

GAPKI mendorong percepatan PSR agar kapasitas produksi sawit nasional mampu menahan beban penurunan akibat cuaca ekstrem. GAPKI memprediksi produksi sawit tahun 2027 sebesar 59,5 juta ton apabila tidak terjadi *El Nino*. Namun, karena *El Nino* terjadi, produksi sawit diperkirakan turun menjadi 53-55 juta ton atau berkurang 3-5 juta ton. "Apabila turun sampai ke angka 53 juta ton tahun depan ini sangat mengkhawatirkan," katanya.

Eddy Martono mengatakan produksi sawit 53 juta ton tidak mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan dalam negeri. Untuk program B50 tahun depan saja dibutuhkan alokasi sekitar 16-17 juta ton. Begitu juga kebutuhan dalam negeri lainnya seperti untuk pangan. Sebagai konsekuensi dari penurunan produksi adalah mengurangi alokasi ekspor. Jika ekspor minyak sawit tahun lalu mencapai 32 juta ton, maka ekspor tahun depan diprediksi sebesar 27 juta ton. "Ini berisiko mengurangi penerimaan dana kelolaan BPDP," katanya.

Penurunan dana kelolaan BPDP akan berdampak pada skema subsidi biodiesel yang berasal dari hasil pungutan ekspor. Apabila dana kelolaan tidak cukup, yang dikhawatirkan adalah Pungutan Ekspor (PE) saat ini 12,5% akan dinaikkan. Padahal kenaikan PE pasti berdampak langsung terhadap harga TBS. "Kalau PE naik dari 12,5 persen menjadi 13,5 persen, maka harga TBS akan turun 1,34 persen," katanya. Kondisi ini akan merugikan petani. "Ini jangan sampai terjadi," katanya. Oleh karena itu, GAPKI mendorong percepatan PSR.

"Pemerintah terus memperkuat industri sawit melalui percepatan PSR sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas kebun rakyat," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam *Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)* di Jakarta pada 20 Agustus 2026. Penandatangan ini dilakukan oleh tiga pihak yakni BPDP, bank penyalur, dan kelembagaan pekebun.

Selain penandatanganan kerja sama PSR, pemerintah juga memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa yang didukung oleh BPDP. Dalam kesempatan ini, 24 perguruan tinggi menandatangani kerja sama sebagai mitra BPDP dalam pelaksanaan Program Beasiswa Kelapa Sawit. Pengembangan SDM dinilai sangat penting sebagai langkah transformasi sawit rakyat, termasuk dalam menjalankan PSR. "PSR merupakan instrumen penting peningkatan produktivitas sawit," katanya.

**Fleksibilitas Kebijakan Biodiesel**

Percepatan mandatori B50 tahun ini belum berdampak signifikan terhadap persediaan CPO. "Alokasi stok CPO untuk B50 pada 2026 masih relatif aman," kata Eddy Martono. Kebutuhan tambahan CPO dapat dipenuhi dengan persediaan tahun ini. Tetapi, tahun depan menjadi fase krusial karena produksi sawit diperkirakan turun. Untuk menghadapi situasi ini, GAPKI mengusulkan kebijakan mandatori B50 diterapkan secara fleksibel.

Fleksibilitas mandatori B50 mempertimbangkan harga minyak dunia dan harga CPO. Apabila harga CPO dunia sedang tinggi, pasokan CPO diarahkan untuk ekspor karena memberikan keuntungan yang besar. Namun, ketika harga minyak dunia tinggi, pasokan CPO diarahkan untuk mendukung minyak nabati dalam negeri. Fleksibilitas mandatori B50 membuka ruang mencapai keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor. "kita bisa memilih mana yang paling menguntungkan bagi negara dan masyarakat," katanya.

Menurut Eddy Martono, fleksibilitas mandatori B50 sangat penting untuk mengantisipasi kondisi tahun 2026. Sebab, peremajaan sawit rakyat hingga program inovasi peningkatan produksi yang dijalankan oleh industri sawit akan berdampak dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penerapan B50 secara fleksibel diharapkan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan ekspor, terutama untuk tahun depan. ■



# MENGENALI POTENSI **RISIKO PKS TANPA KEBUN**

***Berdasarkan data PPKS, Jumlah PKS tanpa kebun dan PKS brondolan mencapai 442 unit.***







Maraknya pabrik kelapa sawit (PKS) tanpa kebun dan PKS brondolan dalam beberapa tahun ini menjadi perhatian serius para pemangku kepentingan industri sawit. Apalagi dampaknya terhadap ekosistem sawit yang sudah terbangun rapi dan terintegrasi dari hulu hingga hilir semakin terasa. Apabila dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan berimbas pada kepercayaan dan reputasi keberlanjutan sawit Indonesia secara keseluruhan serta membuka celah rantai pasok gelap yang sulit ditelusuri asal-usulnya.

"Peraturan dan standar yang setara bagi seluruh entitas rantai pasok sawit harus diterapkan secara tegas," kata Agam Fathurrochman, Kompartemen Hubungan *Stakeholders* GAPKI dalam *Forum Multipihak Memperkuat Rantai Pasok Sawit yang Transparan, Inklusif, dan Berkelanjutan* yang diselenggarakan oleh United Nations Development Programme (UNDP) di Jakarta, 10 September 2026. Forum ini dihadiri oleh perwakilan Kemenko Perekonomian, lembaga riset, asosiasi petani sawit, akademisi, hingga mitra pembangunan internasional.

Berdasarkan data PPKS, saat jumlah PKS tanpa kebun dan PKS brondolan di Indonesia mencapai 442 unit. PKS ini berbeda dibandingkan dengan PKS konvensional yang dikembangkan secara terintegrasi dengan kebun sawit. Selain itu, PKS ini juga didukung riset dan pemuliaan (*breeding*), infrastruktur logistik domestik dan ekspor serta investasi swasta yang signifikan. "Ekosistem industri sawit lebih tertata dibandingkan sektor pertanian yang lainnya," katanya.

Menurut Agam Fathurrochman, kemunculan PKS tanpa kebun dan berondolan berpotensi merusak tata niaga dan mendistorsi pasar yang sudah terbentuk. Salah satu dampak yang paling menonjol adalah munculnya persaingan bahan baku yang tidak sehat karena PKS tanpa kebun dan brondolan tidak didukung oleh kebun sendiri. Rebutan tandan buah segar ini yang menyebabkan terganggunya kontrak pasokan jangka panjang antara perusahaan dan mitra petani yang sudah terjalin.

Persaingan mendapatkan tandan buah segar (TBS) yang tidak sehat ini memicu dampak lain yang lebih serius, yakni pencurian dan penjarahan TBS. Berdasarkan laporan anggota GAPKI, tingkat pencurian TBS di kebun mereka mencapai 50% - 60%. Modus pencurian ini beragam dimulai dari yang samar seperti mengumpulkan brondolan hingga kelompok terorganisir yang menjarah kebun sawit. "Mereka tidak segan menghadapi aparat keamanan," katanya.

Agam Fathurrochman mengatakan dengan ekses yang ditimbulkan oleh PKS tanpa kebun dan brondolan dikhawatirkan berefek pada upaya Indonesia dalam memenuhi persyaratan EUDR, RSPO, dan ISPO. "Kami patut bertanya sejauh mana PKS tanpa kebun menjalankan prinsip *No Deforestation*, *No Peat, No Exploitation* dan ketertelusuran yang mulai berlaku efektif 30 Desember 2026 melalui EUDR," katanya.

Untuk memitigasi risiko di masa depan, GAPKI mengusulkan beberapa langkah antara lain penerapan aturan dan standar yang setara bagi entitas rantai pasok. Selain itu, pemeriksaan kepatuhan ketenagakerjaan, lingkungan, tata niaga hingga ISPO. "Pengawasan lintas instansi harus diperkuat, termasuk pembinaan pemasok dan petani swadaya," katanya.

Peneliti Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS), Ratnawati Nurkhoiry mengatakan selain PKS tanpa kebun, yang perlu diperhatikan juga adalah *loading ramp*. Keberadaan *loading ramp* tidak lepas dari persoalan struktural berulang yang dihadapi oleh petani swadaya. "Kondisi ini seperti lingkaran setan," katanya. Dia mendorong *loading ramp* bertransformasi menjadi koperasi bersertifikasi RSPO untuk kelompok petani swadaya independen. ■

# MEMPERKUAT PERLINDUNGAN **PEKERJA PEREMPUAN**



***"Perlindungan pekerja perempuan bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban."***

Perlindungan pekerja perempuan menjadi salah satu perhatian serius industri sawit untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan mereka. Sosialisasi, implementasi hingga evaluasi kebijakan terkait perlindungan perempuan dilakukan secara berkesinambungan. Tujuannya untuk memberikan perlindungan maksimal bagi pekerja perempuan di industri kelapa sawit Indonesia.

"Perlindungan pekerja perempuan bukan hanya sekadar memenuhi kewajiban, bagian dari upaya membangun lingkungan kerja yang aman, sehat, dan bermartabat," kata Marja Yulianti dari Kompartemen Pekerja Perempuan & Perlindungan Anak GAPKI dalam kegiatan *Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Ruang Perlindungan dan Pengaduan (RP3)* di Jakarta pada 23–24 September 2026. Acara diselenggarakan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Kegiatan ini diikuti oleh 32 peserta dari 26 perusahaan anggota GAPKI. Kegiatan menjadi ruang untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas perusahaan dalam mengelola mekanisme perlindungan dan pengaduan bagi pekerja perempuan di lingkungan kerja. "GAPKI terus mendorong perusahaan anggota untuk memiliki mekanisme perlindungan yang nyata dan dapat berjalan efektif di lapangan," kata Marja.

Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah meningkatkan peranan Komite Gender dan penerapan RP3. Langkah ini tidak hanya berhenti sebagai kelembagaan atau dokumen administratif semata. Mekanisme yang dikenalkan dalam RP3 bukan sekadar dipahami oleh pekerja, namun juga dapat dipercaya untuk digunakan. Komite Gender dan RP3 harus mampu merespons ketika terjadi persoalan.

Menurut Marja, kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha harus ditingkatkan untuk memastikan upaya perlindungan pekerja perempuan diterapkan secara efektif. Bimbingan RP3 yang diberikan dalam kegiatan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk kerja sama dan membuka ruang bagi perusahaan untuk berbagi pengalamannya. GAPKI berharap semakin banyak anggota GAPKI yang memiliki kapasitas dan kesiapan mengembangkan mekanisme perlindungan perempuan hingga menjadi bagian dari tata kelola perusahaan sawit.

Selain bekerja sama dengan Kementerian PPPA, GAPKI juga berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam meningkatkan perlindungan pekerja perempuan. Salah satu kegiatan yang diikuti GAPKI pada September 2026 ini adalah pertemuan dengan pemangku kepentingan terkait penguatan mekanisme perlindungan pekerja perempuan di Kantor ILO Jakarta. Acara yang dihadiri oleh perwakilan GAPKI, JAPBUSI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian PPPA, Kementerian Pertanian, dan RSPO.

Pertemuan ini membahas regulasi dan standar perlindungan pekerja perempuan di instansi masing-masing. Setiap instansi, lembaga atau organisasi pada dasarnya sudah memiliki mekanisme perlindungan terhadap pekerja perempuan. Konsep perlindungan ini tidak selalu sama karena disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Beberapa instansi maupun perusahaan memiliki nama program perlindungan yang berbeda, termasuk juga struktur di dalam perusahaan. Namun, tetap memiliki tujuan yang sama. Pengalaman implementasi ini yang dibagikan dalam kegiatan terkait perlindungan pekerja perempuan. ■



WAWANCARA

# SEHARUSNYA PRODUKSI KITA 60 JUTA TON



**EDDY MARTONO**
KETUA UMUM GAPKI

GAPKI akan mengadakan konferensi tahunan, *Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2026 & Price Outlook 2027* pada November 2026 dengan tema *Palm Oil in Fragmented World: Securing Food, Energy, and Economic Resilience*. Tema ini menegaskan peran minyak sawit dalam kehidupan manusia. Setiap kebijakan Indonesia tentang sawit pasti berdampak pada minyak nabati dunia. Untuk mendapat gambaran lengkap, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan kondisi terkini kepada Redaksi GAPKI News berikut ini:

**Apa latar belakang penentuan tema besar IPOC 2026 pada November nanti?**

Kondisi global saat ini seperti perang Iran melawan Amerika-Israel telah menyebabkan krisis energi di beberapa negara, terutama negara yang pasokan energinya harus melewati Selat Hormuz. Begitu juga dengan ekonomi dunia yang terganggu. Di tengah situasi ini, komoditas sawit justru memberikan *support* luar biasa terhadap ekonomi Indonesia. Ekspor CPO masih berjalan, devisa ekspor terus bertambah, dan sebagainya. Di beberapa industri memang ada masalah, terutama industri yang membutuhkan impor bahan baku. Kondisi global ini yang menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan tema IPOC bulan depan.

**Apa harapan yang diinginkan tema besar IPOC 2026 nanti?**

Peserta IPOC dari beberapa negara pasti ingin tahu kondisi kita sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Mereka ingin tahu arah kebijakan tentang sawit kita karena akan mempengaruhi harga minyak nabati dunia, bukan hanya minyak sawit. Sekarang B50 sudah mulai berjalan meskipun masih dalam fase transisi. Mereka ingin tahu kalau B50 diterapkan secara penuh. Makanya, di IPOC nanti ada pembicara dari dalam negeri, terutama dari pemerintah. Begitu juga pembicara luar negeri untuk memberi perspektif yang lebih luas.

**Bagaimana respon GAPKI ketika ditanya kebijakan Indonesia tentang sawit?**

Ketika ditanya tentang B50, saya sampaikan untuk tahun ini tidak ada masalah. Tetapi kita sudah ingatkan untuk tahun depan ada masalah karena El Niño. Di awal kita menyampaikan pengurangan ekspor bisa lima juta ton. Ternyata waktu rapat GAPKI pusat dan cabang, di beberapa daerah masih ada hujan. Artinya, dampak El Niño tidak sedahsyat kalau semua daerah kering. Jadi pengurangan ekspor maksimal tiga juta ton.

**Kenapa negara lain sangat *concern* dengan kebijakan sawit kita?**

Begini, selama ada manusia di bumi, selama itu juga mereka membutuhkan minyak nabati. Kebijakan sawit Indonesia sangat berpengaruh. Pangsa pasar minyak sawit kita di pasar minyak nabati global itu 33 persen, sangat besar sekali. Seandainya kita stop ekspor minyak sawit, pasti minyak nabati dunia akan guncang. India, China, dan negara lain guncang. Bukan hanya itu, pasokan minyak nabati dunia pasti terganggu harganya. Kalau pasokan dari kita berkurang, harga minyak nabati pasti akan naik.

**Apakah mereka juga bertanya tentang Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI)**

Ya, kita selalu menyampaikan kalau kita terlibat untuk memberikan masukan seperti untuk *platform* DSI dan lain-lainnya. Kita selalu tekankan bahwa sawit berbeda dengan tambang. Kalau ada masalah di pintu keluar, produksi tambang bisa distop. Kalau sawit itu budidaya. Tidak





mungkin kita minta sawitnya jangan berbuah dulu. Pemerintah menyadari kondisi itu. DSI nantinya menjadi *intermediary sold* untuk memastikan tidak ada *fraud* dan sejenisnya. Jadi, tidak ada masalah. Kalau nanti ada *margin fee*-nya, ya jangan terlalu besar karena bisa menekan harga di dalam negeri.

**Apa kebijakan kita yang paling berpengaruh bagi negara importir, B50 atau DSI?**

Sampai saat ini, DSI belum ada keputusan apakah menjadi eksportir tunggal. Masih sebagai perantara. Yang paling berpengaruh itu B50. Sebab, produksi sawit kita 50-an juta ton per tahun. Sementara kebutuhan untuk biodiesel naik menjadi 16 hingga 17 juta ton tahun depan. Padahal produksi kita tahun depan akan mengalami masalah karena El Nino. Kalau ini terjadi, sudah pasti yang dikurangi adalah ekspor. Tidak mungkin kita mengurangi alokasi kebutuhan dalam negeri. Pasti kita utamakan yang dalam negeri. Perkiraan kita ekspor tahun depan turun menjadi 27 juta ton.

**Berapa produksi CPO yang dibutuhkan untuk mendukung B50 tanpa mengurangi ekspor?**

Untuk mendukung B50 seharusnya produksi minyak sawit kita minimal 60 juta ton. Ini cukup seimbang. Artinya, kebutuhan dalam dan luar negeri sama-sama terpenuhi. Untuk mencapai 60 juta ton, luas lahan sawit 16,8 juta hektar itu sangat cukup kalau produktivitas kita bisa 4 ton. Masalahnya produktivitas kita masih 3,5 ton.

**Apakah tidak perlu dilakukan ekstensifikasi?**

Untuk B50 seharusnya tidak perlu. Kalau produksi CPO kita bisa 4 ton per hektar per tahun saja, produksi kita sudah di atas 60 juta ton per tahun. Apalagi kalau bisa kita tingkatkan sampai 5 ton.

**Apa langkah GAPKI untuk mendorong produktivitas sawit, terutama sawit rakyat?**

Justru kita di GAPKI ada namanya Ketua Bidang Percepatan PSR. Sebab dari awal kita sudah menyadari masalah kita adalah produktivitas. Kalau 41 persen sawit rakyat tidak kita bantu PSR-nya, akan berat untuk meningkatkan produksi. Contohnya, sawit rakyat swadaya yang seharusnya *replanting* produktivitasnya di bawah 20 ton TBS per hektar per tahun. Bahkan mungkin ada yang di bawah 15 ton. Kalau perusahaan sudah di atas 20 ton, rata-rata 24-25 ton TBS per hektar per tahun.

**Berapa besar produktivitas sawit rakyat jika dikelola seperti sawit perusahaan?**

Peningkatannya sangat signifikan meskipun lahan kita sudah melalui satu siklus tanam. Yang menjadi masalah kalau ada Ganoderma. Selama tanah itu tidak ada penyakit jamur, tidak ada masalah. Kita kan terus memberi nutrisi mulai pupuk kimia, pupuk organik dari janjang kosong dan sebagainya. Sekarang petani juga sudah mulai sadar dengan itu.

**Apakah program PSR sudah berdampak terhadap peningkatan produksi?**

Program PSR sejak 2017 itu memang ada dampaknya tetapi, tidak terlalu besar. Yang sudah mulai tampak justru peremajaan dari perusahaan. Hal ini terjadi karena pencapaian PSR itu kecil. Mudah-mudahan dengan rencana pemerintah yang lebih serius menangani PSR, dua hingga tiga tahun ke depan sudah mulai kelihatan dampaknya. Kalau perusahaan sudah ditentukan empat sampai lima persen dari total kebunnya harus diremajakan setiap tahun.

**Apakah program PSR menjadi faktor kunci peningkatan produktivitas?**

Ya, pasti. Kita berharap tahun ini pemerintah semakin serius dengan PSR. Tetapi memang masalahnya tahun ini ada El Niño. Kalau kondisi seperti sekarang dengan adanya El Niño tidak mungkin untuk menanam sawit, pasti mati. Kita tunggu sampai tiba musim hujan.

**Bagaimana dampak inovasi yang dilakukan GAPKI selama ini?**

Dalam hitungan kita, kalau inovasi seperti introduksi sumber daya genetik dan serangga penyerbuk sudah berjalan semua, peningkatan produksi bisa 10 persen. Bahkan kalau dua-duanya berjalan bisa sampai 15 persen. Tetapi, Itu tidak bisa serentak, harus bertahap. Yang paling cepat bisa berdampak adalah serangga penyerbuk. Kalau sumber daya genetik butuh waktu karena masih ada uji lapangan dan sebagainya.

**Mana yang berperan lebih besar antara sumber daya genetik dan serangga penyerbuk?**

Yang paling utama itu sumber daya genetik. Itu nomor satu. Yang serangga penyerbuk itu membantu penyerbukan lebih sempurna sehingga buah terbentuk dengan sempurna. Walaupun dua-duanya penting, tetapi yang tidak bisa ditawar adalah sumber daya genetik. Contohnya varietas Dura. Ya, begitu-begitu saja. Minyaknya sedikit karena cangkang tebal. Kalau sekarang kita memakai Tenera yang hasilnya lebih bagus. ■

# MENCEGAH KEKERASAN MELALUI **PENGUATAN KOMITE GENDER**






***GAPKI membuka ruang untuk membangun koalisi multipihak di ekosistem industri sawit.***

Pencegahan kekerasan seksual di tempat kerja, terutama di industri sawit menjadi fokus perhatian GAPKI sejak lama. Bahkan, GAPKI menerbitkan *Panduan Perlindungan Pekerja Perempuan* pada 2021 yang mencakup keberadaan Komite Gender di tempat kerja. Hal ini ditegaskan oleh Ketua Bidang Pengembangan SDM GAPKI, Sumarjono Saragih pada *Seminar Internasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perkebunan Sawit* di Medan, Sumatera Utara pada 19 Agustus 2026.

Seminar ini diadakan oleh Koalisi Buruh Sawit (KBS) bersama International Palm Oil Workers (IPOW) dan diikuti secara daring oleh Federation Nederlandse Vakbeweging (FNV) Belanda. Penguatan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual menjadi pembahasan utama pasca kejadian yang dialami anggota KBS beberapa waktu silam. Hal ini menjadi momentum perbaikan dan perlindungan pekerja perempuan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang aman, setara, dan bermartabat.

"GAPKI mendukung penegakan hukum dan keadilan harus menjadi prioritas, terutama bagi korban," kata Sumarjono yang juga Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan dan Chairman & Founder Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil (WISPO). Penyelesaian satu kasus tidak boleh berhenti pada kasusnya, namun harus menjadi perbaikan, salah satunya memperkuat peran Komite Gender di perusahaan.

Menurut Sumarjono Saragih, kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai lingkungan kerja dan sektor industri. Namun, ketika terjadi di ekosistem sawit, masalah berkembang menjadi isu yang lebih luas dan berpotensi menimbulkan stigma terhadap industri. Oleh karena itu, dalam peristiwa yang menimpa anggota KBS, korban harus ditempatkan sebagai pihak yang harus dilindungi dan memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan.

Dalam sebuah perusahaan, Komite Gender bukan sekadar bagian dari struktur perusahaan, tetapi berfungsi sebagai instrumen untuk pencegahan, edukasi, dialog, pengaduan, serta perlindungan pekerja. Komite Gender menjadi bagian dari sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan pekerja. "Oleh karena itu, keberadaan Komite Gender harus disosialisasikan, dihidupkan dan diperkuat di perusahaan sawit," katanya.

Penguatan Komite Gender dinilai sangat penting di industri sawit, terutama bagi pekerja perempuan di area perkebunan karena lingkungan kerja yang memiliki karakteristik khusus. Pekerja perempuan harus mengetahui haknya, memahami mekanisme pengaduan, serta dijamin bahwa pelapor dijamin aman tanpa intimidasi atau diskriminasi. GAPKI membuka ruang untuk membangun koalisi multipihak dalam memperkuat pencegahan kekerasan di ekosistem perkebunan sawit.

**Komite Gender menjadi bagian dari sistem pencegahan kekerasan dan perlindungan pekerja.**

Menurut Sumarjono, koalisi melibatkan serikat pekerja, pemerintah, organisasi perempuan, organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, lembaga sertifikasi, dan semua pemangku kepentingan lainnya. Kerja sama lintas pihak bertujuan memperkuat edukasi, menyediakan kanal pengaduan yang aman, dan memastikan korban terlindungi. "Kita tidak boleh hanya hadir setelah kekerasan terjadi. Kita harus hadir sebelum kekerasan terjadi," katanya. ■

# KENALKAN SAWIT PADA ANAK SEJAK DINI




***Wakil Sekjen GAPKI Lolita Bangun mengajak mereka melihat sawit sebagai teman.***





Tidak semua siswa sekolah dasar mengenal kelapa sawit, terutama mereka yang hidup di perkotaan. Sawit ibarat teman yang tidak dikenal dan dijauhi, bahkan menjadi teman yang dirundung atau di-*bully*. Padahal mereka menggunakan produk dari sawit setiap hari. Agar sawit menjadi teman yang makin dikenal, GAPKI mengunjungi Early Stage Sekolah Bangun Mandiri di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 22 September 2026. Kunjungan ini bagian dari program *Sobat Sawit Goes to School* sebagai kampanye positif sawit untuk siswa sekolah.

Kepada siswa kelas 1 hingga 6, Wakil Sekjen GAPKI, Lolita Bangun mengajak mereka melihat sawit sebagai teman. Dari pertemanan ini diharapkan menjadi sahabat. "Setelah kenal, akan tumbuh rasa sayang, dan kita akan menjaganya agar tidak dirundung oleh orang yang belum mengenalnya," kata Lolita. Ajakan ini sejalan dengan pesan dan tema kegiatan yakni *Sobat Sawit, Kenal Sawit. Kenal Sawit, Sayang Sawit. Sayang Sawit, Jaga Sawit*."

Untuk memudahkan siswa mengenal sawit, seluruh murid mengunjungi lima *station* dengan didampingi kakak-kakak pembimbing secara bergiliran. Di *station* pertama, murid mengenal manfaat sawit dan produk turunannya. Berbekal lembar kerja, mereka mengidentifikasi kandungan sawit pada produk yang mereka gunakan setiap hari seperti deterjen, biskuit, pasta gigi, dan margarin. Mereka juga diperlihatkan bentuk tandan buah segar sawit dan brondolan sawit melalui gambar.

Buah sawit merupakan hal baru bagi mereka. Oleh karena itu, Kompartemen Pendidikan Dasar & Menengah GAPKI, Intan Nur Cahayani menjelaskan proses brondolan sawit diolah hingga menjadi minyak sawit. Dari minyak sawit ini beberapa produk dikembangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dari stasiun pertama, siswa diajak memasuki *station* kedua yang membahas proses penanaman sawit dan pantangan yang harus dihindari antara lain membuka lahan dengan cara membakar.

Di *station* ketiga, murid diajak mengenal beberapa profesi di industri sawit, mulai dari pekebun, pemanen, asisten kebun, operator pabrik, analis laboratorium, hingga operator alat berat. Sedangkan di *station* keempat dihadirkan *storytelling* boneka tangan tentang perjalanan minyak goreng dari kebun petani hingga ke dapur. Ada satu pesan di *station* kedua untuk siswa yakni pekebun menanam sawit dengan cara yang baik dan tidak membakar lahan karena merugikan makhluk hidup di alam.

Pada *station* terakhir, yakni *station* kelima siswa diajak terlibat dalam kegiatan *art and craft.* Setiap siswa diminta membuat miniatur pohon kelapa sawit dari kawat bulu berbekal pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan di *station* sebelumnya. Mereka tampak antusias dengan kegiatan *art and craft* karena dapat mengekspresikan pengetahuannya tentang bentuk tanaman sawit.

Antusiasme siswa tidak hanya pada sesi pembuatan miniatur pohon sawit. Siswa kelas 4 dan 6 justru lebih banyak bertanya cara menjaga kesuburan tanah setelah panen, kaitan kebun sawit dengan peristiwa banjir, hingga apakah buah sawit dapat langsung dikonsumsi selain dalam bentuk produk olahan. Mereka mendapatkan jawaban yang ringkas, sederhana dan mudah dicerna sehingga dapat memahami yang belum mereka ketahui.

Melalui kegiatan ini, GAPKI berharap generasi muda, terutama siswa sekolah dasar mulai memahami sawit secara utuh. Dengan pemahaman yang baik diharapkan tumbuh perasaan bangga dan peduli terhadap sawit. Mereka diharapkan tumbuh menjadi generasi yang ikut menjaga sawit sebagai komoditas andalan Indonesia. ■

# GAPKI AKSELERASI PENCAPAIAN **SERTIFIKASI ISPO 100 PERSEN**

***Sampai Juli 2026, anggota GAPKI yang tersertifikasi ISPO sebanyak 587 perusahaan.***




GAPKI memprioritaskan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) sebagai agenda penting tahun ini supaya 743 perusahaan anggota GAPKI memiliki sertifikat ISPO. Sampai Juli 2026, anggota GAPKI yang tersertifikasi ISPO sebanyak 587 perusahaan atau 79%. Untuk mencapai target 100% ISPO, GAPKI melakukan percepatan dengan mengadakan *Akselerasi Implementasi ISPO 2026: Sosialisasi dan Klinik Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO)* di Pontianak pada 19-20 Agustus 2026.

Sosialisasi dan klinik ISPO sangat penting, terutama sejak terbit Perpres Nomor 16 Tahun 2025 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan Pementan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Dengan ketentuan ini, cakupan ISPO semkian luas mulai dari sektor hulu, hilir, hingga bioenergi. Ketentuan ISPO tidak hanya terfokus pada perkebunan, namun mencakup pengolahan hingga produk turunan sawit.

"GAPKI mencanangkan komitmen tentang ISPI sejak 2019 bagi seluruh anggotanya," kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono yang disampaikan oleh Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, Aziz Hidayat dalam kegiatan di Pontianak. Sosialisasi ISPO ini diikuti oleh 110 peserta dari anggota GAPKI, internal auditor ISPO, tim *sustainability*, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), dan pemangku kepentingan terkait. Materi ISPO disampaikan oleh Tim ISPO Ditjen Perkebunan Kementan dan lembaga sertifikasi.

Selama dua hari kegiatan, peserta mendapatkan pembaruan kebijakan, pendalaman prinsip dan kriteria ISPO, pembahasan masa transisi regulasi, pelaksanaan audit dan *surveillance*, simulasi audit hingga pengalaman dari perusahaan yang telah memperoleh sertifikat ISPO. "Sosialisasi ISPO ini juga penting untuk memperkuat pembangunan sawit berkelanjutan di Kalimantan Barat," kata Plt. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, Rino Anteno Tengo dalam arahannya kepada peserta.

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi produsen sawit terbesar di Indonesia dengan luas kebun mencapai 2,3 juta hektar pada 2025. Produksi minyak sawit mentah dan minyak kernel pada tahun lalu sebanyak 7,9 juta ton. Potensi besar ini perlu diikuti dengan peningkatan tata kelola dan penerapan prinsip keberlanjutan agar produk sawit Kalimantan Barat mampu menjawab tuntutan pasar global.

Ketua GAPKI Cabang Kalimantan Barat, Aris Supratman meminta peserta memanfaatkan kegiatan ini untuk mendapatkan gambaran utuh proses sertifikasi. Oleh karena itu, peserta diminta menyampaikan kendala yang dihadapi dalam memenuhi persyaratan ISPO sehingga dapat dicari solusinya secara bersama-sama. Apalagi kondisi masing-masing perusahaan berbeda-beda. "Kita ingin kegiatan ini tidak berhenti pada sosialisasi. Kita ingin kegiatan ini menjadi forum pembelajaran, konsultasi, dan *problem solving*," katanya.

Menurut Aris Supratman, ISPO tidak seharusnya dipandang sebagai kewajiban administratif dan persiapan menghadapi audit. ISPO adalah instrumen untuk memperbaiki tata kelola perusahaan, memperkuat sistem manajemen, meningkatkan kepatuhan, mengurangi risiko, sekaligus meningkatkan daya saing industri sawit. Oleh karena itu, peserta diharapkan bisa memulai rencana aksi perusahaan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ISPO. ■



# MEMPERKUAT KEMITRAAN MELALUI **PENYAMAAN PERSEPSI FPKMS**

***Persepsi yang berbeda membuka peluang terjadinya konflik di kemudian hari.***









Perbedaan persepsi tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) yang masih terjadi menjadi perhatian serius pemangku kepentingan industri sawit. Sebab, persepsi yang berbeda membuka peluang terjadinya konflik di kemudian hari. Oleh karena itu, FPKMS harus dipahami dengan persepsi yang sama. “Semua pihak harus bisa menyamakan persepsi terkait FPKMS,” kata Ketua GAPKI Cabang Riau Lichwan Hartono dalam Sosialisasi FPKMS di Pekanbaru pada 15 September 2026.

Sosialisasi FPKMS ini dihadiri oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Kelompok Pembinaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Ditjen Perkebunan Kementan, Koordinator Substansi Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, GAPKI, hingga ratusan petani sawit. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat peran FPKMS sebagai upaya mewujudkan industri sawit yang inklusif dan berkelanjutan di Riau.

Gubernur Riau yang diwakili Kepada Dinas Perkebunan Riau, Suprijadi mengatakan Riau adalah kiblat perkebunan sawit nasional. Total tutupan lahan sawit di Riau mencapai 3,8 juta hektar atau 79,9% dari total luas perkebunan di Riau. Dari seluruh tutupan sawit, perkebunan rakyat mendominasi hingga 61,12% yang diikuti oleh perkebunan besar swasta 36,9% dan perkebunan besar nasional 1,98%. Dari total luas kebun rakyat, sebanyak 94,3% merupakan kebun swadaya masyarakat.

Suprijadi mengatakan realisasi pemenuhan FPKMS mencapai 283.940,98 hektar atau 19,84% dari total luasan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dari 257 perusahaan. Adapun pencapaian FPKMS untuk 24 perusahaan perkebunan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Riau sebesar 28,53% atau di atas batas minimal target nasional. Dia berharap keberhasilan implementasi FPKMS ini juga dapat direalisasikan untuk perhitungan Nilai Optimum Produksi (NOP). Saat ini, penerapan NOP masih membutuhkan pemahaman yang lebih baik agar persepsinya sama.

Menurut Muhammad Iqbal dari Kompartemen Kebijakan dan Sosialisasi PSR GAPKI, kesuksesan FPKMS sangat penting untuk perusahaan dan masyarakat dalam membangun kemitraan yang semakin baik. “Kemitraan itu penting untuk menyeimbangkan industri sawit yang padat modal sekaligus padat karya,” katanya. Perusahaan besar swasna dan nasional berperan dalam proses bisnis yang padat modal. Sedangkan peranan padat karya diwujudkan melalui lembaga pekebun dan petani.

Oleh karena itu, FPKMS didorong sebagai bentuk kemitraan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Pelaksanaan FPKMS perlu memperhatikan kepastian hukum dan kesiapan kelembagaan masyarakat, legalitas lahan, skema pembiayaan, serta keberlanjutan usaha kebun. Kemitraan diharapkan dapat berkembang menjadi hubungan ekonomi yang saling menguntungkan antara perusahaan dan masyarakat.

Iqbal mengatakan industri sawit telah berkontribusi besar kepada negara. Namun, terdapat dinamika kemitraan yang terbagi menjadi tiga kondisi sebelum diberlakukannya Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Tiga kondisi ini adalah kelompok yang tetap bermitra, kelompok yang lepas kemitraan akibat berbagai persoalan, serta kelompok swadaya yang belum pernah bermitra sama sekali.

Iqbal menegaskan keberhasilan kemitraan dan PSR bukan hanya menjadi tanggung jawab perusahaan. Keberhasilan PSR membutuhkan sinergi penuh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kelembagaan petani. Oleh karena itu, keberadaan PKS tanpa kebun dan PKS brondolan ditertibkan agar tidak merusak tata kelola kemitraan yang sudah terbangun. ■

# GAPKI SUMUT DUKUNG *GRAND DESIGN* RISET SAWIT BRIN

***Indonesia baru mengembangkan 200 produk turunan sawit sebagai bagian dari hilirisasi.***



Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia baru mengembangkan sekitar 200 produk turunan sawit sebagai bagian dari hilirisasi. Jumlah ini jauh di bawah China yang telah mengembangkan lebih dari 1000 produk. Oleh karena itu, GAPKI Cabang Sumatera Utara mendukung inisiatif Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk mengembangkan inovasi hilirisasi sawit melalui penyusunan *grand design* riset kelapa sawit yang bersifat jangka panjang.

Dukungan ini disampaikan oleh Ketua GAPKI Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting dalam *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema *Pemetaan Rantai Nilai, Hilirisasi, dan Arah Investasi Strategis Industri Kelapa Sawit Indonesia* di Tangerang Selatan pada 3 September 2026. FGD yang diinisiasi oleh Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan BRIN ini mengundang GAPKI sebagai salah satu narasumber. “Walaupun kita produsen sawit terbesar, tetapi kita masih ketinggalan,” kata Timbas.

Dalam pemaparannya, Timbas mengatakan hilirisasi sawit di Indonesia sebenarnya sudah bertransformasi dari sekadar penghasil CPO menjadi industri pengolahan bernilai tinggi. Tiga bidang hilirisasi yang sudah berjalan adalah pertama sektor pangan yang meliputi minyak goreng, margarin, dan *shortening*.

Kedua, non-pangan antara lain sabun, kosmetik, bahan farmasi, hingga pelumas. Ketiga, bidang energi terbarukan seperti pengembangan biodiesel, biogas, dan bioavtur.

Timbas Prasad Ginting mengatakan hilirisasi di bidang energi terbarukan yang dilakukan oleh Pusat Rekayasa Katalis Institut Teknologi Bandung (ITB) sudah menghasilkan bensin yang terbuat dari minyak sawit. Bensin ini memiliki nilai *Research Octane Number*, RON 105-112, artinya sangat bagus. Bensin ini dikembangkan menggunakan teknologi sistem katalis khusus yang mampu mengubah struktur minyak nabati dan limbah sawit menjadi senyawa hidrokarbon yang serupa dengan minyak bumi.

**“Walaupun kita produsen sawit terbesar, tetapi kita masih ketinggalan,” kata Timbas.**

Sebagai industri yang bebas limbah (*zero waste*), semua elemen yang berasal dari tanaman kelapa sawit dapat dimanfaatkan. Selain minyak sawit dan minyak inti sawit, limbah sawit seperti cangkang (*shell*), serat (*fiber*), tandan kosong (*empty fruit bunch*), dan limbah cair (*Palm Oil Mill Effluent*/POME) dapat dimanfaatkan untuk produk bernilai. Beberapa produk yang dikembangkan dari limbah sawit adalah bahan bakar pembangkit listrik, pupuk organik, pelet biomasa, hingga bio-CNG (*Compressed Bio-Methane*).

Menurut Timbas, riset tentang hilirisasi sawit juga dilakukan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Tetapi, hasil risetnya masih perlu didorong agar semakin menyentuh hilirisasi. “Oleh karena itu, BRIN dapat bekerja sama dengan dunia industri agar hasil risetnya lebih aplikatif,” katanya. BRIN didorong untuk bekerja sama dengan asosiasi yang berkaitan dengan produk turunan sawit seperti APROBI, GIMNI, dan APOLIN. “Kalau GAPKI lebih banyak bergerak di sektor hulu perkebunan,” katanya.

Saat ini, ekspor produk olahan sawit cukup positif dengan volume mencapai 11,76 juta ton hingga Juni 2026. Pencapaian ini melampaui ekspor minyak sawit mentah sebesar 1,34 juta ton. “Hal ini membuktikan bahwa program hilirisasi di dalam negeri berjalan secara efektif,” katanya.

Meskipun demikian, dia mendorong pengembangan produk berbasis sawit yang lebih luas untuk menjangkau pasar yang lebih besar.■

# PRODUKTIVITAS SEBAGAI **KUNCI MENJAGA EKSPOR**

***GAPKI mengusulkan skema permintaan naik, produktivitas meningkat.***




Penerapan kebijakan B50 secara penuh pada 2027 diperkirakan menekan ekspor minyak sawit karena meningkatnya konsumsi dalam negeri. Implementasi B50 membutuhkan 17,4 juta ton sehingga ekspor pada 2027 diperkirakan turun sekitar 5 juta ton. Penurunan ekspor akan semakin tajam apabila mandatori B60 dijalankan, sementara produktivitas tanaman tidak meningkat secara signifikan.

"Penerapan penuh B50 pada 2027 akan menurunkan ekspor secara dalam," kata Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono dalam The *6th Palm Biodiesel Conference* yang diadakan oleh Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) di Bali pada 17–18 September 2026. Selain GAPKI, pemateri lain adalah Kementerian ESDM, Kementerian Komoditas dan Perkebunan Malaysia, Malaysia Palm Oil Board (MPOB), Pertamina Patra Niaga, Malaysia Biodiesel Association, dan Thai Biodiesel Producer Association.

Dalam presentasi berjudul *Indonesian Palm Industry Readiness for B50 Mandate: Feedstock Capacity, Challenges, and Outlook*, Eddy Martono mengatakan peranan vital minyak sawit dalam transisi energi nasional. GAPKI menegaskan stok minyak sawit tahun ini cukup untuk mendukung B50 tahun 2026. Namun, untuk tahun 2027 perlu mendapat perhatian serius. Sebab, penurunan ekspor dapat mengurangi penerimaan pajak dan pungutan ekspor yang mendanai subsidi biodiesel.

Menurut Eddy Martono, peningkatan produktivitas merupakan kunci keberhasilan program B50 tanpa harus mengurangi ekspor. Oleh karena itu, GAPKI mengusulkan pergeseran skema dari *permintaan naik*, *lahan bertambah* menjadi *permintaan naik*, *produktivitas meningkat*. Skema ini dapat dijalankan dengan beberapa langkah antara lain percepatan peremajaan sawit, terutama sawit rakyat, tidak mengkonversi hutan primer dengan memberikan perlindungan Nilai Konservasi Tinggi (HCV).

Selain itu, intensfikasi harus ditingkatkan dengan menggunakan benih unggul bersertifikat dan praktik agronomi yang lebih baik. GAPKI juga mendorong mekanisasi dalam proses panen sehingga kehilangan buah hasil panen dapat ditekan. Pelaku industri sawit juga didorong untuk beradaptasi dengan pertanian digital dan implementasi pemupukan presisi agar efektivitas pemupukan meningkat. Sebagai bagian dari sawit berkelanjutan, sertifikasi ISPO, ketertelusuran, dan tata kelola lahan yang kuat harus dijalankan.

"Sumber tambahan CPO yang paling berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas dari perkebunan yang sudah ada," katanya. Luas perkebunan sawit nasional 16,8 juta hektar cukup memadai untuk mendukung transisi energi ke depan selama produktivitas dapat ditingkatkan dari sekarang. Peningkatan produktivitas diprioritaskan untuk sawit rakyat yang luasnya mencapai 6,9 juta hektar.

Eddy Martono menegaskan program B50 yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud tanpa melibatkan petani swadaya. Tetapi, mereka menghadapi tantangan besar antara lain pohon yang sudah tua dan produktivitas rendah, akses benih bersertifikat terbatas, pendapatan selama *replanting*, legalitas lahan dan pendampingan.

GAPKI mendorong akselerasi PSR baik melalui jalur mandiri maupun kemitraan. "PSR bukan sekadar program kesejahteraan petani. Ini investasi nasional yang strategis bagi keamanan bahan baku di masa depan," katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum APROBI, Catra Aradea de Thouars mengatakan biodiesel berbasis sawit berperan strategis dalam memperkuat ketahanan energi dan mendukung transisi menuju *net-zero* emissions di kawasan Asia Tenggara. Langkah ini telah mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil impor. "Di Asia Tenggara, kemajuan kita terlihat nyata," katanya. ■



# GAPKI PERLUAS **KOLABORASI DENGAN INDIA**

***India memangkas bea masuk dasar CPO dari 10% menjadi 5% mulai 24 September 2026.***




GAPKI memperluas kolaborasi dengan India untuk peningkatan produktivitas, keberlanjutan dan ketertelusuran komoditas sawit. Langkah ini sebagai bentuk penguatan kemitraan yang telah terjadi selama ini. India merupakan pasar penting minyak sawit Indonesia karena setengah dari kebutuhan minyak sawit diimpor dari Indonesia. Perluasan kolaborasi ini disampaikan oleh Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono ketika memberikan sambutan dalam *GlobOil India 2026* di Mumbai, India pada 29 September 2026.

*GlobOil India* merupakan konferensi dan pameran industri minyak nabati terbesar di Asia Selatan. Dalam kegiatan ini, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan dipercaya menjadi salah satu pemateri konferensi. Selain itu, GAPKI memanfaatkan *GlobOil India* untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan untuk pasar India. “India adalah salah satu pasar utama minyak sawit Indonesia,” kata Eddy Martono.

Sepanjang kuartal pertama 2026, ekspor sawit Indonesia ke India mencapai 988 ribu ton atau tumbuh 28% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Ekspor minyak sawit ke India diharapkan terus meningkat. Apalagi India memangkas bea masuk dasar CPO dari 10% menjadi 5% mulai 24 September 2026. Peluang ini dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk perdagangan CPO, namun juga peningkatan produktivitas industri sawit di kedua negara.

Menurut Eddy Martono, kebutuhan minyak sawit India diperkirakan sekitar 7-8 juta ton per tahun hingga 2030. Negara ini masih menjadi salah satu pasar utama CPO Indonesia. Oleh karena itu, kolaborasi antara industri sawit Indonesia dan India harus diperluas. Langkah yang ditempuh GAPKI adalah melanjutkan nota kesepahaman dengan *Solvent Extractors’ Association of India* dan *Asian Palm Oil Alliance* yang ditandatangani di *GlobOil 2025*. GAPKI juga menjajaki kerja sama dengan Indian Vegetable Oil Producers’ Association.

Dalam konferensi ini, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono memaparkan kenaikan konsumsi domestik Indonesia untuk memenuhi mandatori B50. Selain itu, industri sawit Indonesia juga menghadapi tekanan produksi akibat El Niño. Fenomena kekeringan ekstrem ini sudah melanda Sumatera dan Kalimantan sebagai sentra sawit Indonesia. Oleh karena itu, GAPKI memperkirakan produksi sawit tahun 2027 turun sekitar 2,9% menjadi 56,8 juta ton.

Selain itu, Eddy Martono menjelaskan Indonesia menjadi negara pertama yang menerapkan biodiesel B50 dengan target cakupan penuh pada 1 Oktober 2026. Mandat ini diperkirakan 15,2–16,3 juta ton CPO per tahun, sehingga surplus untuk ekspor semakin ketat. GAPKI juga menegaskan tentang keberadaan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Kebijakan terkait DSI bukan pembatasan perdagangan, tetapi restrukturisasi tata kelola ekspor. Perdagangan tetap mengalir, namun mekanismenya yang berubah.

Sementara itu, Ketua Bidang Luar Negeri GAPKI, M. Fadhil Hasan mendorong perjanjian I-EU CEPA dalam perdagangan produk sawit. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa ini memberikan kuota ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa dengan bea masuk 0% serta bebas bea keluar dan pungutan ekspor. Kuota ini dimulai dari 1,9 juta ton dan naik 3% per tahun selama sembilan tahun. “Ini bergantung pada kesiapan industri memenuhi regulasi EUDR,” katanya.

Menurut Fadhil Hasan, hal krusial dalam pemenuhan regulasi EUDR adalah ketertelusuran kebun petani kecil dan penyelarasan ISPO dengan sistem verifikasi Uni Eropa. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan industri sawit bahu-membahu mendorong petani sawit, terutama petani swadaya, dapat meningkatkan produktivitas sekaligus memenuhi regulasi EUDR. Oleh karena itu, percepatan peremajaan sawit rakyat dan peningkatan produktivitas menjadi bagian penting untuk menjaga daya saing industri.

GAPKI berharap *GlobOil India 2026* menjadi ruang dialog dengan pembeli, pedagang, dan pelaku industri minyak nabati global untuk membangun kemitraan jangka panjang yang bertumpu pada produktivitas, keberlanjutan, dan ketertelusuran. ■



# DIGITALISASI MEMPERMUDAH **KETERTELUSURAN SAWIT**

***"Traceability semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap informasi asal bahan baku dan proses produksi."***




Transformasi digital yang meningkat pesat sejak dua dekade silam telah merambah berbagai sektor industri. Termasuk di dalamnya industri perkebunan sawit. Digitalisasi yang berawal dari pengembangan jaringan dan adopsi teknologi, sekarang berkembang menjadi *enabler* dalam peningkatan produktivitas serta daya saing. Digitalisasi memudahkan proses bisnis, termasuk ketertelusuran (*traceability*) produk berbasis sawit.

"*Traceability* semakin penting seiring meningkatnya kebutuhan pasar terhadap informasi asal bahan baku dan proses produksi," kata Mochamad Husni dari Kompartemen Media Relations GAPKI dalam *The 3rd Digital Transformation Forum* (DTF) 2026 yang diadakan oleh Selular Media Network di Jakarta pada 11 September 2026. Forum ini mengangkat topik *Kolaborasi Lintas Industri, Lembaga dan Kementerian, Mendorong Digitalisasi dan Kemajuan Ekonomi*.

Adopsi teknologi industri sawit berlangsung secara bertahap, diawali dari kegiatan di hilir dan sekarang sedang berkembang ke arah hulu. Pekerjaan di hulu seperti pencatatan kebun, pengelolaan logistik tandan buah segar, hingga pelaporan keberlanjutan awalnya dilakukan secara manual. Namun, seiring dengan ketersediaan teknologi yang semakin mudah, proses manual mulai beralih ke otomasi dengan teknologi digital.

Menurut Mochamad Husni, tuntutan pasar global terhadap *traceability* semakin meningkat. Industri harus memiliki kemampuan untuk mengetahui dan mendokumentasikan asal-usul produk, termasuk hingga tingkat perkebunan. Dalam konteks ini, teknologi seperti AI, *drone*, citra satelit, IoT (*Internet of Things*), hingga analisa data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi serta akurasi pengelolaan perkebunan. "Misalnya, AI digunakan membantu memprediksi produksi buah," katanya.

Pemanfaatan teknologi di sektor sawit tidak hanya bergantung pada ketersediaan perangkat lunak dan AI. Oleh karena itu, kolaborasi antara pelaku usaha sawit, pemerintah, operator telekomunikasi, dan penyedia teknologi sangat penting untuk membangun ekosistem yang sesuai dengan kebutuhan industri. "Adopsi teknologi harus diarahkan pada kebutuhan nyata sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, serta kualitas data," katanya.

Dalam transformasi teknologi, kolaborasi menjadi kebutuhan mutlak karena tidak semua industri memiliki kapabilitas teknologi secara mandiri. Di sinilah peran penyedia teknologi dan operator telekomunikasi berperan. Dalam forum yang menghadirkan berbagai kalangan ini, kolaborasi lintas sektor menjadi pembahasan utama.

Menurut CEO sekaligus *Editor in Chief* Selular Media Network, Uday Rayana, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh banyaknya teknologi baru yang digunakan. "Digitalisasi dinilai berhasil apabila meningkatkan daya saing industri, memperluas manfaat teknologi, dan menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi," katanya. Dia mendorong agar pemerintah dan dunia usaha memperkuat kolaborasi untuk mempercepat transformasi di berbagai industri. ■



# GAPKI BERIKAN **MASUKAN TATA KELOLA BMKS**

***Ada tujuh catatan penting yang mendapatkan perhatian GAPKI.***





Dalam waktu tiga bulan ke depan, Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) akan beroperasi, tepatnya pada 1 Januari 2027. Pasar terorganisasi ini akan memperdagangkan komoditas unggulan nasional secara transparan dan terpusat. Salah satu komoditas yang diperdagangkan adalah *crude palm oil* (CPO). Bursa ini bertujuan membangun *Indonesia Reference Price* (IRP) atau harga acuan nasional. IRP diharapkan mengakhiri ketergantungan pada bursa luar negeri dalam menentukan harga komoditas yang dihasilkan di Indonesia.

"GAPKI mendukung pembentukan harga acuan mandiri agar Indonesia tidak tergantung pada bursa luar negeri," kata Ketua Bidang Perpajakan dan Fiskal GAPKI, Yustinus Lambang Setyo Putro dalam *Rapat Koordinasi Kesiapan Komoditas Strategis BMKS* di Jakarta pada 18 April 2026. Untuk mendorong BMKS mencapai tujuan, GAPKI memberikan beberapa catatan terkait tata kelola bursa. Ada tujuh catatan penting yang mendapatkan perhatian GAPKI.

Pertama, bursa harus independen dan bebas dari konflik kepentingan, campur tangan atau intervensi politik, maupun manipulasi oleh pihak tertentu. Kedua, sebagai produsen dan eksportir minyak sawit Indonesia harus mengoptimalkan posisi dominannya dalam produksi dan eksportir komoditas sawit secara global. Ketiga, komoditas yang diperdagangkan harus memiliki likuiditas dan volume transaksi harian yang tinggi agar pasar tetap aktif.

Keempat, sistem *traceability* komoditas harus kuat untuk memastikan asal-usul komoditas, termasuk yang berkaitan dengan aspek keberlanjutan, perizinan, serta sertifikasi ISPO dan RSPO. Kelima, pembentukan harga harus mencerminkan kekuatan permintaan-penawaran riil dan bebas dari praktik *transfer pricing*. Keenam, integrasi data yang kuat antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Badan Industri Mineral, dan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ketujuh, biaya yang dibebankan pada peserta bursa tidak boleh menambah beban industri sawit.

Menurut Yustinus, selama ini industri sawit dibebani beberapa kewajiban antara lain Bea Keluar (BK), Pungutan Ekspor (PE), *Domestic Market Obligation* (DMO), dan retensi Devisa Hasil Ekspor (DHE). "Struktur beban ekspor Indonesia jauh lebih tinggi dibanding Malaysia," katanya. Total beban ekspor Indonesia USD 297/ton, sedangkan Malaysia USD 121/ton. Selain itu, kepastian posisi DSI juga menjadi pertimbangan dalam tata kelola BMKS.

Sementara itu, Wakil Sekjen GAPKI, Lolita Bangun menegaskan pentingnya perlindungan data dan kepastian insentif bagi pelaku usaha. Dia juga mendorong penggunaan simulasi teknologi *Artificial intelligence* (AI) untuk memodelkan berbagai variabel kompleks dalam penentuan harga. Simulasi berbasis AI diharapkan dapat menjelaskan dampak kombinasi antara ancaman penurunan produksi akibat *El Niño*, peningkatan konsumsi domestik untuk biodiesel, serta kenaikan biaya ekspor terhadap posisi tawar Indonesia di pasar global.

GAPKI berharap masukan dan perspektif dari industri sawit dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam merumuskan regulasi BMKS. Masukan dari lapangan diharapkan dapat mengoptimalkan peran BMKS sehingga mampu memperkuat kedaulatan ekonomi nasional tanpa mengurangi daya saing industri sawit Indonesia.

Anggota Komisi VI DPR, Ahmad Labib menegaskan status DSI bukan sebagai regulator dan berada di bawah BUMN. Oleh karena itu, DPR akan mengevaluasi arah kebijakan DSI berdasarkan masukan dari pelaku usaha, akademisi, dan lainnya. "Kita ingin memastikan operasional DSI tidak memperpanjang rantai niaga dan menambah biaya logistik," kata Labib dalam diskusi yang diadakan oleh Diskursus Network dan NEXT Indonesia Center di Jakarta pada 17 September 2026.

Menurut Labib, DPR berencana mengonsolidasikan seluruh pemangku kepentingan dalam satu forum pembahasan untuk menyelaraskan regulasi lintas kementerian dan lembaga yang selama ini masih tumpang tindih. ■



# PUBLIK BUTUH PUBLIKASI SAWIT **YANG SEIMBANG DAN AKURAT**

***Perhatian pada isu lingkungan harus seimbang dengan apresiasi bahwa sawit adalah pilar ekonomi nasional.***




Media memiliki independensi dan sikap kritis dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Namun, sikap kritis harus berdasarkan fakta dan memperhatikan kepentingan nasional yang lebih luas dalam pemberitaan. Pentingnya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kebebasan pers ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pendidikan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Agus Sudibyo dalam *Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI* di Yogyakarta pada 28 Agustus 2026.

Pelatihan ini bertujuan memperkuat sinergi antara industri sawit dan media dalam edukasi publik tentang tata kelola industri sawit berkelanjutan, ramah lingkungan, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Selain PWI, pemateri pelatihan ini antara lain guru besar Universitas Jember, Ermanto Fahamsyah dan ekonom senior INDEF, Bustanul Arifin serta dari Bidang Komunikasi GAPKI. Materi yang diberikan mencakup keseluruhan aspek komoditas sawit, termasuk tantangan industri di masa sekarang dan masa depan.

Agus Sudibyo menjelaskan peran strategis sawit antara lain penyumbang devisa nonmigas terbesar Indonesia, penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, penggerak perekonomian daerah, pendukung ketahanan energi hingga penyedia minyak nabati serta bahan baku industri pangan. “Perhatian terhadap isu lingkungan harus seimbang dengan apresiasi dan pengakuan bahwa sawit adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional,” katanya. Dia juga menegaskan negara lain yang aktif melindungi produknya demi kepentingan nasional.

Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir mengatakan media berperan besar menyampaikan informasi yang objektif dan berbasis data di tengah narasi negatif sawit di tingkat global. Hal ini tidak lepas dari persaingan dagang global yang memanfaatkan isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan sawit. Oleh karena itu, jurnalisme berbasis fakta empiris sangat penting untuk memberi gambaran yang utuh tentang sawit. “Namun, media harus kritis dan mendorong perbaikan tata kelola dan penerapan *good corporate governance*,” katanya.

Menurut guru besar Universitas Jember, Ermanto Fahamsyah, kelapa sawit adalah anugerah bagi Indonesia karena kontribusinya yang cukup signifikan. Meskipun sawit bukan tanaman asli negeri ini, tetapi sawit dapat tumbuh subur dan menghasilkan minyak sawit yang punya nilai manfaat sangat besar. “Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat,” katanya.

Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengatakan memahami komoditas sawit secara utuh dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang. Pelatihan ini diharapkan berkontribusi menjelaskan kepada publik tentang peran sawit dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bahkan, di daerah yang tidak memiliki kebun sawit, manfaat sawit dapat dirasakan. Inilah salah satu alasan kota Yogyakarta dipilih sebagai tempat pelatihan wartawan. Bahkan, dari kota inilah lahir inovasi batik yang menggunakan malam berbahan dasar minyak sawit.

Dalam kesempatan ini, Eddy Martono memaparkan tantangan industri sawit terkait dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). GAPKI secara aktif terlibat dalam upaya pemadaman kebakaran, termasuk di luar wilayah konsesi perusahaan, seperti di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau. Tetapi, ada konsekuensi yang dihadapi yakni pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang tanggung jawab mutlak.

Dengan pasal ini, perusahaan dinilai lalai apabila ada api atau kebakaran di lahan konsesinya meskipun titik api berasal dari luar konsesi. “Oleh karena itu, kami mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian, terutama pada kondisi cuaca ekstrem,” katanya. Hal ini perlu pemahaman yang komprehensif.

Dengan memahami masalah sawit secara utuh, media diharapkan dapat memahami konteks masalah sehingga pemberitaan objektif berdasarkan fakta, berimbang, dan berperan dalam mencerdaskan publik. ■






# SINERGI SEBAGAI KUNCI KETAHANAN PANGAN DAN ENERGI

***"Program pencegahan karhutla menjadi unggulan dengan Training of Trainer 2026."***

Sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit, Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam keberhasilan program ketahanan pangan dan energi berbasis sawit. Untuk mencapai keberhasilan program ini, sinergi para pemangku kepentingan industri sawit menjadi syarat mutlak. Oleh karena itu, GAPKI Cabang Sumatera Selatan (Sumsel) memperkuat sinergi dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan energi.

Penguatan sinergi ini disampaikan oleh Ketua GAPKI Cabang Sumsel, Alex Sugiarto dalam Rapat Kerja Cabang (Rakercab) GAPKI Sumatera Selatan di Palembang, 9 September 2026. Rakercab yang dihadiri oleh Sekjen GAPKI, M. Hadi Sugeng dan Wakil Ketua Umum III GAPKI, Satrija B. Wibawa ini mengangkat tema *Bersinergi Menjaga Industri Sawit untuk Memperkuat Ketahanan Pangan dan Energi*. Rapat ini mengevaluasi 33 program kerja 2025-2026 yang mencakup seluruh aspek industri kelapa sawit.

Menurut Ketua GAPKI Sumsel, Alex Sugiarto, posisi GAPKI Sumatera Selatan sebagai mitra pemerintah harus diperkuat dengan meningkatkan sinergi. Begitu juga dengan pemangku kepentingan industri sawit lainnya. Salah satu sinergi yang dilakukan antara lain antisipasi kebakaran hutan dan lahan Satgas Karhutla, Stasiun Klimatologi Kelas I Sumatera Selatan, dan GAPKI dalam *monitoring* titik panas di wilayah ini. "Program pencegahan karhutla menjadi unggulan dengan *Training of Trainer 2026*," katanya.

Sinergi untuk antisipasi karhutla juga diwujudkan dalam bentuk antara lain distribusi buletin BMKG hingga pengadaan dua set mesin pompa siap operasi. Selain itu, GAPKI Sumsel juga aktif dalam forum diskusi tentang upah tenaga kerja untuk tahun 2026. Sebagai organisasi pengusaha sawit, partisipasi GAPKI dalam pembahasan upah pekerja sangat penting karena industri sawit menyerap banyak tenaga kerja.

Dalam rapat ini dilaporkan aktivitas GAPKI Sumsel yang aktif dalam program komunikasi dan kampanye positif sawit melalui berbagai forum sebagai narasumber. Salah satunya tentang antisipasi maraknya tandan buah segar sawit belakangan ini. Bagi pengusaha kelapa sawit, isu ini sangat penting untuk memberi rasa aman dalam berusaha. Oleh karena itu, sinergi dengan aparat penegak hukum terus ditingkatkan untuk mencegah tindakan pencurian.

Menurut Alex Sugiarto, salah satu momentum keberhasilan GAPKI Sumsel tahun ini adalah pelaksanaan Andalas Forum 2026. Forum tahunan yang berlangsung April 2026 itu cukup sukses dan memperkuat posisi Sumatera Selatan dalam lanskap industri sawit nasional. "Keberhasilan Andalas Forum juga memperkuat *positioning* GAPKI Sumsel," katanya.

Saat ini, GAPKI Sumatera Selatan beranggotakan 77 perusahaan aktif yang terdiri dari perusahaan swasta dan negara. Total perkebunan sawit yang dikelola mencapai 341 ribu hektar dari total kebun sawit di Sumatera Selatan seluas 1,2 juta hektar.

Jumlah anggota GAPKI Sumatera Selatan diharapkan terus bertambah untuk kepentingan industri sawit di Sumatera Selatan secara keseluruhan. ■

